

AGAMA, ETNIS DAN POLITIK DALAM PANGGUNG KEKUASAAN (SEBUAH DINAMIKA POLITIK *TAUKE* DAN KIAI DI MADURA)

M. Imam Zamroni

Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bulaksumur
B-13 Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 557845 Fax (0274) 557845.e-mail: imam_z@yahoo.com

Abstract

This article aims to describe political movement of tauke and kijaji in Madura showing a significant role with their economic capital and religious capital that have become basic of political movement to influence of society. The tauke and kijaji try to install their power by participating in a certain political party for occupying strategic positions either in village or regional level. An effort building connections with others local elites becomes one of political strategies in occupying structural power. In the one hand, Tauke are non indigenious people as Chinese ethnic and the other hand kijaji are indigenious people as Madurese, they are having difference resources of power basically. In the some case, they combined the power as political strategy to appease local Democratic Party (Pilkada) in Pamekasan Madura. By paying attention in a tobacco trade case, a condition which power relation among tauke, juragan, and bandol that actually oriented towards managing and huge profit in process, also experienced species changes in each of their personal modal, then they makes a power relation among them in tobacco trade structure. Finally, within elite's perspective, capitaleconomics, cultural, social, and religion are always command in all matter.

Key words: religion, structural, political

Pendahuluan

Kiai memiliki basis massa cukup kuat yang notabene adalah masyarakat santri, baik yang tinggal di dalam pesantren maupun masyarakat di sekitar pesantren. Sedangkan *tauke* mempunyai basis massa pedagang tembakau dan petani yang secara kuantitas juga cukup besar, karena Pamekasan merupakan sentra perdagangan tembakau Madura. Meskipun demikian eksistensi *tauke* tidak hanya didukung dengan basis masa petani saja,

tetapi juga kekuatan kapital ekonomi yang cukup besar. Umumnya mereka adalah orang-orang kaya di daerahnya.

Tingkat kesejahteraan petani di Madura sangat dipengaruhi dengan tinggi-rendahnya harga tembakau pada musim panen dan harga tembakau sangat bergantung pada pihak pabrik sebagai pembeli tembakau dari petani yang dikuasai oleh *tauke* dan *juragan* tembakau, sehingga tercipta hubungan ketergantungan (*dependensi*). Meski demikian, dalam struktur perdagangan tembakau, posisi petani selalu berada pada level yang paling lemah dan tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*). Secara struktural, petani menempati posisi paling bawah yang menanggung beban berat dalam mata rantai perdagangan tembakau yang terbentuk secara alami namun telah menyebabkan marginalisasi pada kelompok mayoritas ini. Jika harga tembakau *anjlok*, petanilah yang merasakan penderitaan paling tragis dibandingkan dengan para pedagang tembakau tersebut.

Terkadang di kalangan masyarakat petani tembakau di tingkatan akar rumput, tinggi rendahnya harga tembakau juga dikaitkan dengan kiprah kepemimpinan elite, yang dalam hal ini adalah bupati. Memang hal tersebut sulit ditemukan kerangka teoriti maupun relevansinya, tetapi demikianlah asumsi yang ada dalam masyarakat petani di Pamekasan. Himpitan kesulitan perekonomian membuat mereka mengkaitkan persoalan-persoalan yang fenomenal dengan kondisi riil yang dihadapi oleh petani. Isu itupun mencuat dan menjadi wacana sentral dalam Pilkada yang diusung oleh salah satu calon bupati.

Sebagai contoh, ketika Pilkada 8 Maret 2008, di Pamekasan terdapat salah satu kandidat bupati yang memproklamasikan sebagai pahlawan tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu Dwiatmo dan Supriadi. Persoalan kesejahteraan petani adalah masalah klasik yang tidak pernah tuntas dan sampai sekarang menjadi tugas berat pemerintah kabupaten Pamekasan Madura. Mayoritas petani tembakau di Madura merupakan petani gurem atau petani yang hanya mempunyai sedikit tanah. Di samping itu, dalam konteks perdagangan tembakau, pemerintah kabupaten Pamekasan sendiri tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar, meski sudah terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perdagangan tembakau, yaitu Perda no 02 tahun 2002 dan Perda no 03 tahun 2002.

Perdagangan tembakau di Madura mempunyai mata rantai yang melibatkan beberapa aktor penting dengan kapasitas modal yang cukup beragam. Dalam mata rantai tersebut terbangun relasi sosial yang bersifat hirarkhis, mulai dari *tauke*, *juragan*, *bandol*, *tengkulak* dan berujung pada petani yang biasa disebut dengan *orang kenek* (orang kecil). Masing-masing aktor tersebut hampir selalu menampakkan loyalitasnya terhadap pedagang yang lebih “digdaya” secara capital. Dalam situasi Pilkada, relasi antar-pedagang yang berorientasi pada keuntungan sosial-ekonomi, juga dapat berubah menjadi relasi politik yang berorientasi pada kekuasaan. Ini merupakan wacana baru yang mewarnai dinamika perpolitikan di Madura, karena pada masa Orde Baru para aktor-aktor yang tergabung dalam mata-rantai perdagangan tembakau “absen” dari dunia politik praktis dan lebih didominasi pada peran kiai, sebagai elite agama sekaligus sebagai elite kultural yang berkecimpung dalam politik praktis. Sehingga, karena basis struktur kekuasaannya berbeda antara *tauke* dengan kiai, maka gerakan politik yang dibangun juga berbeda. Perbedaan ini merupakan bagian dari dinamika politik lokal di Madura pasca tumbangunya Orde Baru.

Tulisan ini hendak mendiskusikan model-model gerakan politik yang dilakukan oleh *tauke* dan kiai di Pamekasan-Madura, dalam konteks persoalan-persoalan identitas diantara dua tokoh tersebut dengan mengambil kasus Pilkada di Pamekasan-Madura pada 5 Maret 2008. Gerakan-gerakan politik kontemporer dalam konteks lokal tumbuh subur bak jamur di musim hujan dengan nuansa lokalitas yang melingkupinya, seiring dengan semangat desentralisasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada sisi lain, tulisan ini juga mencoba untuk mendiskusikan konspirasi politik antara *tauke* dan kiai. Menganalisis pertarungan politik tertentu tidak bisa terlepas dari proses sosial yang kompleks, dalam hal ini adalah agama, etnis dan kapital ekonomi (Tilly, 2007: 27).

Potret Pilkada di Pamekasan

Pilkada di Pamekasan-Madura yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2008 diikuti oleh tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Pasangan cabub dan cawabub dengan nomor urutan pertama yaitu KH. Khalilurrahman dan H. Kadarisman Sastrodiwirjo yang dikenal dengan nama

“Kondang” dan sekaligus sebagai pasangan yang memenangkan Pilkada untuk memimpin kabupaten Pamekasan pada periode 2008-2013. Pasangan yang kedua yaitu: H Achmad Syafii dan Shahibudin yang dikenal dengan nama “Asas”, sedangkan pasangan yang ketiga yaitu H. Dwiatmo Hadianto dan Supriadi yang dikenal dengan nama “Dwiadi”. Masing-masing pasangan me-miliki jargon dan gerakan politik yang berbeda-beda, bahkan lebih dari itu, latar belakang sosial calon juga beragam; ada yang berlatar belakang kiai, birokrat, pengusaha dan politisi.

Di samping itu terdapat beberapa kandidat yang tercatat sebagai *incumbent*, yaitu H. Kadarisman Sastrodiwirjo, sebagai mantan wakil bupati Pamekasan periode 2003-2008, H Achmad Syafii sebagai mantan bupati kabupaten Pamekasan periode 2003-2008 dan H. Dwiatmo Hadianto mantan sebagai bupati kabupaten Pamekasan periode 1998-2003. Adapun beberapa nama kandidat yang lain sebagai pendatang baru (*new comers*) di Pamekasan-Madura yang mencoba untuk berpartisipasi dalam dunia politik praktis demi tegaknya demokrasi pemerintahan lokal.

Karena secara teori, elite politik mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi di tingkat lokal. Niatan elite berpartisipasi dalam dunia politik seharusnya sebagai wujud pendidikan politik di tingkatan masyarakat akar rumput, meskipun tidak jarang niatan mulia tersebut terpelosok dalam lembah jurang perebutan kekuasaan belaka. Dalam hal ini, politik hanyalah dimaknai sekedar arena pertarungan dan adu kekuasaan dengan berbagai macam modal yang dimilikinya. Sebagai etnis China, *tauke* mengandalkan kekuatan kapital ekonomi yang sangat melimpah, sehingga model gerakan politiknya tidak mengepankan kekuatan massa, namun “pergerakan kapital”. Sedangkan kiai, lebih meng-andalkan basis massa yang loyal kepada mereka, seperti masyarakat santri.

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah juga telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada dengan menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin yang dianggap memiliki predikat terbaik. Pilkada yang merupakan media pendidikan politik bagi masyarakat kabupaten Pamekasan berlangsung serentak di 1.352 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 189 desa. Total warga yang terdaftar sebagai pemilih yaitu 597.562 orang (Surya, 06/03/2008). Berdasarkan jumlah pemilih

tersebut, masyarakat yang memberikan hak pilihnya berjumlah 470.430 suara dan sebanyak 127.222 orang abstain atau tidak memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 5 Maret 2008 (KPUD Kab. Pamekasan 2008). Adapun rincian perolehan suara masing-masing calon yang terbagi dalam setiap kecamatan yang ada di kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel: Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan dalam Pilkada Kabupaten Pamekasan 5 Maret 2008 (Sumber: KPUD Kabupaten Pamekasan, 2008)

Kondang		Asas		Dwiadi	
Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara
Tlanakan	14.518	Tlanakan	12.584	Tlanakan	6.031
Pademawu	12.957	Pademawu	18.310	Pademawu	16.351
Galis	5.241	Galis	7.648	Galis	5.570
Larangan	12.760	Larangan	13.172	Larangan	7.669
Pamekasan	15.237	Pamekasan	23.142	Pamekasan	10.887
Proppo	19.145	Proppo	16.074	Proppo	6.053
Palengaan	25.119	Palengaan	17.552	Palengaan	1.436
Pegantenan	23.555	Pegantenan	12.891	Pegantenan	1.451
Kadur	15.643	Kadur	10.081	Kadur	2004
Pakong	12.990	Pakong	7.904	Pakong	667
Waru	21.106	Waru	12.414	Waru	1.189
Batumarmar	30.801	Batumarmar	8.670	Batumarmar	1.459
Pasean	19.664	Pasean	9.701	Pasean	2.050
Total	228.736	Total	170.080	Total	62.817

Secara umum proses Pilkada di kabupaten Pamekasan berlangsung aman, tertib dan damai. Meskipun demikian, belajar dari berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Nusantara ini yang mengiringi

proses Pilkada, pemerintah kabupaten Pamekasan melibatkan 1.800 personel polri untuk menjaga keamanan proses pemungutan suara. Mereka berasal dari Dalmas polda Jatim (100 personel), Brimor dari empat wilayah (500 personel), Denkal (40 personel), Rantis (30 personel), Polres Jajaran (450 personel), serta Polres Pamekasan dan Kanwil Madura (680 personel) (Radar Madura, 07/03/2008). Proses Pilkada tentunya melibatkan seluruh elemen masyarakat, begitu pula dengan aktor-aktor politik yang terlibat di dalam pesta demokrasi. Fenomena gerakan politik terselubung dalam masyarakat akar rumput untuk memperoleh dukungan massa sebanyak-banyaknya dilakukan oleh *blater/bajing*. Blater merupakan sekelompok preman yang terorganisir secara rapi. Di samping itu, dalam masyarakat Madura, *blater* merupakan fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri, karena sudah menyatu dalam sistem sosial masyarakat.

Kehidupan kelompok *blater* lekat dengan tindakan kriminal dan praktik kekerasan (Rozaki, 2004: 57; Wiyata, 2002: 243). Kelompok ini diyakini oleh politisi mampu menggerakkan basis massa di tingkatan masyarakat akar rumput, karena eksistensi *blater* sangat ditekuni dan disegani di daerahnya. Berdasarkan keterangan salah satu kandidat bupati dalam sebuah perbincangan dengan saya,

...*blater* mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap elite yang didukungnya, mereka selalu memegang teguh pembicaraan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahkan jika sampai berkorban nyawa sekalipun, mereka akan melakukannya. Oleh karenanya, orang yang mendapatkan dukungan dari *blater* juga harus mempunyai komitmen tinggi untuk menanggung kehidupan keluarga *blater* yang ditinggalkan, jika mereka harus mendekam di penjara atau mati karena melakukan pembelaan terhadap kandidat bupati. Tidak seperti politisi pada umumnya yang mudah berubah pikiran, bahkan berkhianat.

Singkatnya di Pamekasan, dan Madura secara keseluruhan, kelompok putih dan kelompok hitam selalu terlibat dalam pertarungan politik. Kelompok hitam dalam masyarakat Madura merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaan dan partisipasi politik yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan prestasi sosial (*social prestige*), mendapatkan predikat jagoan dikalangan perblateran dan memperkokoh bangunan kekuasaannya. Semakin banyak dukungan dan kekuatan yang didapatkannya, mereka akan semakin ditakuti, disegani dan berkuasa sebagai orang pribumi. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, tidak

ditemukan *blater* yang notabene adalah etnis Cina, mereka selalu berlatar belakang pribumi dan hampir selalu beragama Islam. Ini dapat diketahui melalui cara berpakaian para *blater* yang mirip dengan pakaian seorang kiai sebagai pemimpin pesantren.

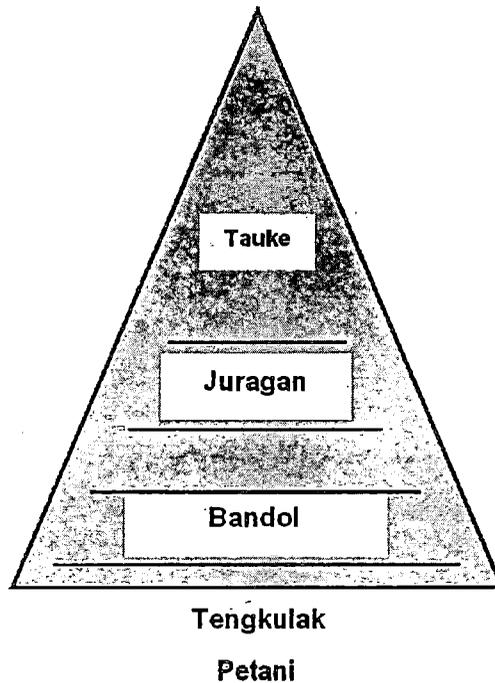
Kiai di Madura tidak hanya terdapat dalam pesantren yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang sangat luas, tetapi seorang penguasa “perblateran” yang mempunyai sejumlah kemampuan mistik terkadang juga disebut dengan *kiai blater*, mereka mempunyai sejumlah anggota yang sangat loyal kepada pemimpinnya. Biasanya tubuh mereka mempunyai kekebalan dengan senjata tajam. Ini dapat diartikan bahwa, agama tidak hanya menjadi perekat sosial dan identitas dalam dunia santri yang selalu menunjukkan ketaatannya kepada norma-norma agama Islam, tetapi dalam konteks Madura, agama juga menjadi perekat sosial dan identitas di dunia perblateran. Islam lokal hampir selalu memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam masyarakat yang memeluknya, karena masyarakat di seluruh Indonesia ini juga memiliki keragaman-keragaman budaya lokal.

Gerakan Politik *Tauke*

Tauke merupakan sosok elite ekonomi yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat, disegani dan dihormati karena kekayaan material yang dimilikinya dan kepercayaan pihak pabrik yang sudah diperolehnya sebagai *grader* (orang yang menentukan harga tembakau) dalam perdagangan tembakau di Madura. Mereka adalah etnis Cina yang berkecimpung dalam perdagangan tembakau di Madura dengan kapasitas modal besar dan merupakan kelompok yang dipercaya oleh pabrik rokok tertentu. Jalinan relasi sosial-ekonomi dalam perdagangan tembakau mengakar cukup kuat dan membentuk piramida kekuasaan yang menunjukkan bahwa pada posisi puncak merupakan kelompok yang paling digdaya secara ekonomi. Posisi *tauke* berada pada tingkat yang paling atas dan mempunyai wewenang untuk menentukan tinggi rendahnya harga tembakau yang dijual oleh para *juragan*, *bandol* dan *tengkulak*, begitu pula sang *juragan* juga berhak menentukan harga tembakau yang dijual oleh para *bandol* maupun *tengkulak*, tak jarang relasi sosial-ekonomi ini bersifat kontraktual pada musim panen tembakau saja. Relasi struktural tersebut merupakan modal utama dalam melakukan

gerakan politik bagi *tauke* jika mereka juga berkecimpung dalam dunia politik praktis. Secara lebih spesifik piramida tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut:



Gambar: Piramida Relasi Kuasa Dalam Perdagangan Tembakau

Relasi kekuasaan antara *tauke*, *juragan*, *bandol* dan *tengkulak* yang didasarkan pada ikatan kontrak sosial-ekonomi dalam perdagangan tembakau, sangat dipengaruhi oleh besaran modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing individu, semakin besar dana yang diberikan untuk membeli tembakau di tingkatan petani, maka akan semakin besar pula loyalitas yang ada dalam masyarakat tersebut. Begitu pula yang terjadi pada kelas *bandol* dan petani tembakau sebagai kelas sosial yang paling bawah atau sering disebut dengan *oréng duméh*. Secara sosiologis, ini menjadi kenyataan sosial dalam mata rantai perdagangan tembakau. Relasi kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan sosial-ekonomi tersebut mampu berubah

menjadi sangat politis. Para *bandol* akan memberikan dukungan kepada *juragannya* untuk memperebutkan kekuasaan struktural pada level desa maupun pada level kabupaten/kota, terlebih jika sang *juragan* tersebut sudah menunaikan ibadah haji.

Sejumlah *tauke* juga masuk agama Islam. Masuknya Islam sejumlah *tauke* membawa sejumlah keuntungan sosial ekonomi. Secara sosial, kerekatan sosial yang dibangun diantara para pedagang dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura akan semakin kokoh, karena para *bandol* selalu mengedepankan simbol-simbol Islam yang mereka pahami. Secara ekonomi, kerekatan sosial tersebut akan menumbuhkan loyalitas terhadap praktik bisnis yang ditekuni dan tentunya akan mendatangkan sejumlah keuntungan material. Terlebih jika seorang *tauke* yang sudah masuk Islam tersebut sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka para *bandol* akan semakin loyal. Predikat haji merupakan prestasi sosial dalam masyarakat Madura yang sangat taat terhadap ajaran-ajaran Islam yang dipeluknya.

Singkatnya relasi kekuasaan yang terbangun dalam mata rantai perdagangan tembakau bersifat sangat kompleks, kondisi sosial budaya masyarakat lokal turut memperteguh bangunan kekuasaan dalam aktor-aktor perdagangan tembakau di Madura. Dimensi agama mempunyai peran di dalam membangun kerekatan sosial antar *bandol*, karena mereka hampir selalu menonjolkan simbol-simbol Islam dalam aktifitasnya sehari-hari. Tak jarang mereka melangsungkan transaksi jual-beli tembakau di gudang tembakau, yang notabene adalah milik *tauke*, menggunakan sarung, peci, dan baju takwa sebagai identitas Islam lokal Madura yang mereka yakini dan imani. Meski dihadapan para *tauke*, simbolisme-simbolisme sebagai identitas pada *bandol* tersebut belum tentu membawa pengaruh yang signifikan.

Kelompok *tauke*, meskipun mereka digdaya secara ekonomi karena kekayaan material yang melimpah, akan tetapi mereka tidak berkuasa untuk menduduki jabatan struktural karena faktor etnisitas yang mengakibatkan tertutupnya peluang-peluang politik (*political opportunities*). Dukungan massa tidak cukup kuat, seperti halnya yang dimiliki oleh kiai sebagai orang pribumi dan sekaligus elite kultural. Masyarakat Madura mempunyai ikatan

etnis yang cukup kuat, terutama mereka yang berada di daerah perantauan (Rifai, 2007: 347). Sampai saat ini tidak ditemukan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari etnis Cina atau etnis yang lainnya, mereka selalu berasal dari etnis pribumi yang terkadang masih keturunan kiai. Hasil Pilkada menunjukkan bahwa yang menjadi bupati pada periode 2008-2013 adalah kiai dan budayawan. Rupanya pertarungan etnis tidak membawa dampak yang signifikan dalam Pilkada di Pamekasan-Madura, sedangkan agama masih cukup mendominasi untuk memobilisasi massa di tingkatan akar rumput. Bahkan predikat etnis Cina sebagai identitas merupakan sebuah hambatan untuk menduduki jabatan struktural-birokratis. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mempunyai basis masa yang cukup kuat dan untuk mendukung gerakan politiknya, mereka lebih menekankan kekuatan kapital.

Dua modal, ekonomi dan agama, sebagai instrumen penentu dalam pilkada, tercermin dalam pasangan terpilih (Kondang). Peta politik yang dibentuk yaitu, agama sebagai simbol dan struktur luar (*surface structure*) dalam gerakan politik untuk memperoleh dukungan massa sebanyak-banyaknya yang termanifestasi dalam peran kiai atau tokoh agama dengan basis pesantren atau masyarakat santri. Sedangkan modal ekonomi (*economic capital*) sebagai struktur dalam (*deep structure*) untuk memformulasikan gerakan politik seluruh tim sukses yang terlibat untuk mendukung pasangan calon bupati. Isu yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan dukungan *tauke* terhadap pasangan terpilih sudah tidak rahasia lagi. Oleh karenanya, kekuasaan ekonomi yang digdaya merupakan aspek penting dalam gerakan politik. Gerakan politik *tauke* hanya sebatas melakukan dukungan-dukungan politik dengan sejumlah kelebihan material yang mereka miliki kepada kandidat bupati dengan maksud jika mereka berhasil terpilih sebagai bupati, maka mereka akan melindungi unit-unit bisnis yang dimilikinya. Tidak ada aturan-aturan yang akan menghadang ekspansi bisnisnya.

Ranah modal yang dimiliki oleh *tauke* bersifat amat kompleks. Ketika *tauke* (muslim) telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, ke-wibawaan dan pengaruh sosialnya juga semakin menguat, bahkan mereka juga semakin disegani oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Singkatnya, simbol-simbol keagamaan dalam masyarakat Madura juga berperan sebagai sarana

untuk mengukuhkan kedudukan sosial, *prestige* dan mem-bangun legitimitasi kekuasaan dan pada ranah inilah identitas etnis menjadi luntur, dan identitas Islam menjadi semakin menguat kepermukaan.

Predikat Haji bagi *tauke* mampu didapatkan dengan mudah, karena mereka termasuk golongan orang-orang kaya. Haji juga mampu dijadikan sebagai perekat sosial dalam relasi kekuasaan antara *tauke*, *juragan*, *bandol*, dan *tengkulak*. Ini adalah bagian lain dari gerakan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh *tauke* yang dibingkai dengan agama. Dari sini dapat diketahui bahwa, modal ekonomi yang melimpah merupakan sumber kekuasaan yang pertama dan utama bagi mereka untuk mengukuhkan kekuasaan (Bourdieu, 1994: 11).

Ketaatan masyarakat terhadap sosok elite yang dinilainya mempunyai kelebihan-kelebihan secara material maupun spiritual merupakan modal sosial (*social capital*) bagi akumulasi kekuasaan yang bersifat relasional. Dalam wilayah praksis, terbukanya ruang politik yang semakin longgar sebagai sarana untuk mengakses kekuasaan struktural, mendorong partisipasi politik *oréng soghi*. Kendati demikian cara mereka mengekspresikan kekuasaan ke tengah publik tidaklah seragam. Sumber pengetahuan, kekuatan modal dan situasi sosial turut menentukannya akan keragaman sosial. Modal ekonomi yang dimiliki oleh *tauke* terus mengalami perubahan-perubahan spesies modal yang semakin memperteguh bangunan kekuasaannya (Dhakedae, 2003: 54). Teori tersebut terbukti dalam relasi kekuasaan antara *tauke*, *juragan* dengan *bandol*, dalam mata rantai perdagangan tembakau.

Terdapat beberapa model gerakan politik yang tercermin dalam kelompok *tauke* yaitu, model gerakan politik dengan basis modal ekonomi (*economic capital*), model gerakan politik yang didasarkan pada mata rantai perdagangan tembakau (jaringan sosial-ekonomi), dan model gerakan politik yang didasarkan pada budaya masyarakat. Semua itu membentuk satu kesatuan yang saling menguatkan dan memperkokoh posisi sosial seorang *tauke*.

Gerakan Politik Kiai

Dalam konteks model gerakan politik kiai, mereka seringkali menggunakan dalil-dalil al-Quran dan Hadits sebagai sumber ajaran-ajaran agama Islam untuk menjustifikasi dukungan kiai kepada calon eksekutif maupun legislatif yang diusungnya. Ketaatan masyarakat Madura terhadap ajaran agama Islam dapat dimanfaatkan oleh kiai dan kiai dimanfaatkan oleh politisi dan politisi dimanfaatkan oleh pengusaha dan begitulah seterusnya. Jalinan antar elite tersebut berujung pada perebutan kekuasaan dengan bingkai simbol-simbol keagamaan yang mampu menciptakan bius sosial. Agama telah diperalat dan tak ubahnya seperti pisau bermata ganda. Meski telah terjadi perubahan-perubahan loyalitas masyarakat kepada kiai, namun kiai sebagai elite agama masih cukup berpengaruh dalam berbagai hal, seperti budaya, politik bahkan dalam beberapa tahun terakhir juga merambah pada sektor ekonomi. Loyalitas tersebut termanifestasi dalam semboyan *bhuppa bhabhu, ghuru, rato* (bapak-ibu, guru dan pemerintah) turut mewarnai dinamika politik lokal di Madura (Rifai, 2007: 422).

Selain itu, praktik-praktik inkonstitusional dan antidemokrasi muncul dan melingkupi hiruk pikuk Pilkada di Pamekasan-Madura, seperti kiai menyerukan kepada kaum santri untuk memilih figur tertentu dan jika tidak mematuhi mereka diancam akan mendapatkan kesengsaraan atau *walad*. Menurut cerita dari beberapa politisi di Pamekasan, dukungan masa dari kiai tertentu mempunyai tanda yang menempel saat seorang santri memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk meyakinkan kepada kandidat yang didukungnya. Sehingga pesantren menjadi kantong massa calon tertentu yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Institusi pendidikan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan islam “disulap” menjadi suatu institusi yang kental dengan nuansa politik.

Karena hampir di seluruh pelosok kepulauan Madura, bahkan seluruh masyarakat Jawa yang menganut agama Islam, seorang kiai masih dianggap sebagai orang suci yang memiliki sejumlah kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang awam pada umumnya dan sekaligus sebagai mediator dengan Sang Pencipta. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kiai tidak hanya pada otoritas keagamaan dengan pengetahuan yang luas, akan tetapi

dalam konteks masyarakat Madura, juga otoritas sosial-budaya dan politik (Horikhoshi, 1987: 86).

Dalam hal ini, kiai lebih mengandalkan modal agama (*religious capital*) dengan basis massa yang taat dan patuh kepadanya sebagai modal untuk melakukan tawar-menawar dan kontrak politik tertentu dengan kandidat yang didukungnya, sedangkan *tauke* mengandalkan kapasitas modal ekonomi (*economic capital*) yang cukup kuat untuk memberikan dukungan kepada kandidat dengan membentuk “negara bayangan” (*shadow state*). Ciri utama dari pendekatan *shadow state* terletak pada artikulasi struktur sosial sebagai bagian dari faktor determinan bagi akumulasi ekonomi (Hidayat, 2007: 279).

Di tengok dari latar belakang historisnya, kelompok *tauke* merupakan kelompok yang “digdaya” secara kapital ekonomi. Ke-efektifan kekayaan material sebagai senjata politik ditegaskan oleh para elit melalui evolusi bentuk-bentuk kekayaan dan evolusi bentuk-bentuk otoritas (Duverger, 2005: 258). Memang terdapat berbagai macam modal dalam suatu gerakan politik kiai, seperti modal agama (*religious capital*), modal budaya (*cultural capital*) dan modal sosial (*social capital*), akan tetapi modal ekonomi (*economic capital*) merupakan kekuatan fundamental dalam setiap gerakan politik yang dilakukan oleh elite politik dan sekaligus dapat berperan sebagai instrument legitimasi (Bourdieu, 1994: 127). Di dalam gerakan politik kiai terdapat pertautan antara, modal kultural, modal religi dan modal ekonomi. Etnis pribumi menjadi penopang kokohnya kekuasaan kiai dibandingkan dengan *tauke* yang bergerak di “belakang layar”.

Keterlibatan saya dengan beberapa politisi di Madura menjelang Pilkada, menyimpulkan bahwa terdapat perubahan-perubahan gerakan politik yang dilakukan oleh kiai. Dalam kasus kiai *langgér* (*keyaé kéné*), saat ini bukan seorang politisi yang berusaha mendekati diri kepada kiai, namun malah justru sebaliknya. Ketika menjelang Pilkada seorang kiai *langgér* di Madura terus mencari peluang-peluang politik (*political opportunities*) untuk memberikan dukungannya. Mereka ingin mendapatkan pengakuan dari elite politik dengan menggunakan makelar politik atau broker politik sebagai perantara. Ketika calon yang diusung mampu men-duduki kekuasaan politik,

maka “kedigdayaan” seorang kiai akan bertambah kuat, meski mereka tetap berada di luar struktur kekuasaan birokrastis.

Uniknya, kiai selalu berusaha untuk menghadirkan elite politik di kediamannya dengan alasan *silaturrahmi*. Dalam beberapa kasus yang saya temukan, mereka tidak bersedia hadir di kediaman elite politik yang akan didukungnya karena di mata masyarakat hal itu masih dinilai negatif, bahkan terdapat kiai yang sangat merahasiakan pertemuan dengan elite politik, karena terdapat konflik dengan saudaranya yang sama-sama kiai. Namun mereka sangat mengharapkan elite politik tersebut dapat hadir di kediamannya. Ini terbukti ketika saya mendampingi salah satu kandidat bupati, kami sudah sangat lelah berkeliling ke beberapa kediaman kiai di pelosok pedesaan di Pamekasan untuk memenuhi permintaan kiai berkunjung ke kediamannya dan memperoleh dukungan. Tepat pukul 23.00 kami berencana kembali ke sekretariat untuk beristirahat, akan tetapi telepon genggam masih terus berdering dan masih ada kiai yang menunggu di kediamannya dan berbagai jamuan sudah dipersiapkan. Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, dan pukul 02.00 dini hari baru selesai memperbincangkan tentang berbagai hal terkait dengan masalah Pilkada nanti, dan gerakan politik yang akan dilakukan.

Terlepas dari perubahan gerakan politik kiai tersebut, konflik politik telah membuat beberapa pesantren terpecah, seperti pesantren Banyuwangi Timur dan pesantren Banyuwangi Barat. Pendeknya, persaudaraan dalam umat Islam yang seringkali didengung-dengungkan sangat mudah terkikis dengan kepentingan para tokohnya. Oleh karenanya, apa yang dikatakan oleh Clifford-Geertz (1960), bahwa kiai sebagai pialang kebudayaan (*cultural broker*) dalam konteks Pamekasan sudah tidak relevan lagi, akan tetapi kiai telah berubah menjadi pialang politik (*political broker*) yang sangat mudah dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperoleh dukungan massa pada level masyarakat akar rumput. Keterlibatan kiai dalam bidang-bidang tertentu dapat membentuk suatu predikat atau sebutan terhadap kiai yang bersangkutan.

Akibatnya muncul berbagai macam predikat yang dilekatkan kepada kiai, tatkala tokoh agama itu mempunyai peran ganda bahkan multiperan. Seperti kiai *rajeh*, kiai *kene*, kiai *langgér*, kiai *dhokun*, kiai pengusaha, dan

kiai politik. Dari sinilah, kita tahu bahwa secara sosiologis, munculnya kiai merupakan hasil dari reproduksi sosial yang didukung oleh faktor geneologis dan penguasaan pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh seseorang (Zamroni, 2007: 175). Akan tetapi terdapat juga beberapa justifikasi yang memperkuat posisi sosial yang diduduki kiai di Madura yaitu kepemilikan santri yang banyak, telah melaksanakan ibadah haji ke Makah dan penggunaan simbol-simbol keagamaan.

Sebutan kiai politik mengindikasikan keterlibatan mereka dalam dunia politik yang menyebabkan semakin memudarnya kharisma seorang kiai di mata rakyat. Ekses negatif ini tentunya tidak dirasakan oleh kiai yang terlibat dalam perpolitikan saja. Para kiai yang tidak berpolitik pun merasakan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dalam masyarakat. Peran ganda kiai politik dinilai telah menyalahi koridor dan filosofi masyarakat Madura. Karakter sosial yang khas dan spesifik inilah yang tidak ditemui dalam masyarakat Jawa pada umumnya. Sebuah tradisi akan kehilangan kekuatannya kalau sudah dipersiapkan secara obyektivistik dan diterapkan dengan menggunakan strategi-strategi tertentu (Habermas, 2004: 228). Begitupula pada diri kiai akan terjadi krisis legitimasi, karena kharisma sosial yang semakin memudar.

Kemenangan pasangan Kondang dalam Pilkada di Pamekasan sedikitnya didukung oleh tiga kiai besar yang memiliki pondok pesantren yang ada di tiga daerah yaitu Palengaan, Panyebben, dan Banyuanyar. Dalam hal ini kiai dicitrakan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang luar biasa, sehingga mereka dapat meyakinkan kepada masyarakat akar rumput untuk “menyatukan suara” dalam Pilkada. Politik pencitraan dapat mendorong seseorang untuk mengambil keputusan sesuai dengan elite yang direpresentasikan (Saward, 2006: 54).

Model gerakan politik yang dibangun oleh kiai tentunya berbeda dengan *tauke*, karena sumber-sumber kekuasaan yang dibangun juga berbeda. Adapun model gerakan politik kiai yaitu: model gerakan politik berbasis agama (*religious capital*), model gerakan politik berbasis budaya (*cultural capital*) dan model gerakan politik berbasis ekonomi (*economic capital*).

Simpulan

Selain sebagai pesta demokrasi di tingkat lokal kabupaten/kota dan pendidikan politik bagi masyarakat, Pilkada juga dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan antar elite dengan berbagai modal yang dimiliki dan gerakan politik yang beragam. Pilkada sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dan proses demokratisasi lokal akan menciptakan transformasi sosial politik, sedangkan Pilkada sebagai ajang perebutan kekuasaan antar elite akan menciptakan konflik dan mereduksi dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Wacana etnisitas ditelan oleh wacana agama dalam Pilkada di Pamekasan-Madura diperankan oleh kiai sebagai tokoh agama di Madura. Orang Madura masih berpegang teguh pada elite lokal pribumi. Sehingga *tauke* sebagai etnis Cina hampir tidak mempunyai peluang untuk menduduki jabatan struktural di tingkatan kabupaten/kota. Oleh karenanya gerakan politik yang dilakukan lebih mengarah pada niatan untuk melindungi usahanya dari intervensi pemerintah kabupaten/kota dan mengekspansi bisnisnya, terutama dalam bidang perdagangan tembakau yang menjadi andalan masyarakat Madura.

Dewasa ini, para bos lokal tumbuh subur dalam keanekaragaman lingkungan lebih luas dan tidak lagi bersandar pada kepemilikan tanah yang luas atau hubungan-hubungan patron-klien sebagai penyangga utama kekuasaan mereka. Kontrol terhadap pejabat terpilih memberi akses pada luasnya pengaturan sumber dan hak-hak istimewa negara (Sidel, 2005: 79).

Berangkat dari sumber kekuasaan yang beragam, antara *tauke* dan kiai, maka model gerakan politik yang dilakukan oleh kedua elite tersebut juga beragam yang diperkuat dengan perbedaan tujuan dalam berpartisipasi dalam dunia politik praktis. Partisipasi politik *tauke* sebagai etnis Cina lebih menitik beratkan pada upaya melindungi bisnisnya dari intervensi pemerintah, sedangkan kiai sebagai etnis pribumi berorientasi pada dukungan kepada elite politik tertentu dan/atau perebutan kekuasaan struktural-birokratis yang dapat semakin memperteguh eksistensi mereka sebagai tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonym. 2008. *Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pamekasan*. Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkada.
- Bourdieu, Pierre. 1994. In *Other Words; Essays Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Dhakedae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker*. In: *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 2, No. 2 hal. 228-249.
- Habermas, Jürgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Yogyakarta: Qalam.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Shadow State...?; Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*. Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Eds.). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Mansurnoor, Lik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesia World Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Rifai, Mien A. 2007. *Manusia Madura; Pembawan Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Saward, Michael. 2006. *Representative and Direct Democracy*. Dalam Roland Axtmann (Ed.) *Democratic Politics: An Introduction*. London: Sage Publication.
- Sidel, John T. 2005. *Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia; Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang "Orang Kuat Lokal"*. dalam John Harriss (Ed.). *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.

- Tilly, Charles and Sidney Tarrow. 2007. *Contentious Politics*. Paradigm: Publishers.
- Turmudzi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Zamroni, M. Imam. 2007. Kekuasaan Juragan dan Kiai di Madura. *KARSA, Jurnal Studi Keislama*. vol XII no. 2, hal 168-179.
- Harian Surya. 06 Maret, 2008.
- Radar Madura. 07 Maret, 2008.